



## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang dalam Perspektif *Good Governance*

Angga Putra Tri Rezeki<sup>1\*</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>, Nora Eka Putri<sup>3</sup>, Asnil<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 25132

**Abstract.** *This study examines the accountability of regional financial management in the Government of Padang City from a good governance perspective. Accountability in regional financial management is an essential element in ensuring transparent, effective, efficient, and responsible public financial administration. The objective of this study is to analyze the accountability of regional financial management by considering fiscal performance, financial transparency, the implementation of the Government Internal Control System (SPIP), public sector auditing, the competence of government officials, the utilization of information technology, and the application of the value for money principle. This research employed a qualitative descriptive approach using document analysis and literature review. Secondary data were collected from regional financial reports, audit reports issued by the Supreme Audit Agency of Indonesia, regional regulations, government performance documents, and relevant scientific publications. The findings indicate that the Government of Padang City demonstrates relatively good accountability in regional financial management, as reflected by its achievement of an Unqualified Opinion (WTP) for twelve consecutive years, high regional revenue realization, and the implementation of transparency, internal control mechanisms, and information technology in financial administration. However, the dominance of operational expenditure compared to capital expenditure suggests the need to improve budget effectiveness and strengthen development-oriented spending. The study implies that strengthening transparency, internal control, human resource competence, information technology utilization, and value for money principles is necessary to enhance the quality of regional financial governance and support sustainable public service improvement.*

**Keywords:** *accountability; good governance; regional financial management; transparency; value for money*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang dalam perspektif *good governance*. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian kinerja fiskal, transparansi pengelolaan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), audit sektor publik, kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip *value for money*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, peraturan daerah, dokumen kinerja pemerintah daerah, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang berada pada kategori yang relatif baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas tahun berturut-turut, tingginya realisasi pendapatan daerah, serta adanya penerapan transparansi, pengendalian internal, dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan transparansi, SPIP, kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip *value for money* perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Kata kunci:** akuntabilitas; good governance; pengelolaan keuangan daerah; transparansi; value for money

## **1. LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan *good governance*. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan publik (Sungkar, 2023; Maolani et al., 2023; Mandasari et al., 2024; Frinaldi & Putri, 2024).

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, penguatan kepercayaan publik, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Mandasari et al., 2024; Nabila & Maulina, 2025). Akuntabilitas juga menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Putri et al., 2025).

Pemerintah Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menunjukkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Padang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali secara kumulatif atau 12 tahun berturut-turut hingga laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Padang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan memenuhi prinsip kewajaran penyajian laporan keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2026).

Selain memperoleh opini WTP secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang juga menunjukkan kinerja fiskal yang relatif baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, total APBD Kota Padang

ditetapkan sebesar Rp2,86 triliun. Dari total anggaran tersebut, belanja operasional mencapai sekitar Rp2,37 triliun atau sekitar 90 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal sebesar Rp252 miliar atau sekitar 9,5 persen. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,85 triliun atau sebesar 99,15 persen dari target yang telah ditetapkan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025; InfoPublik, 2024; Padangkita, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki kapasitas fiskal yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Meskipun demikian, keberhasilan memperoleh opini WTP belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, tetapi belum menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran maupun manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Prayogo et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan prasyarat penting dalam pelaporan keuangan pemerintah, namun kualitas tata kelola keuangan daerah juga ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik. Talantan et al. (2025) menegaskan bahwa audit sektor publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit menjadi faktor yang menentukan efektivitas pengawasan keuangan daerah.

Komposisi APBD Kota Padang yang didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal juga menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dituntut mampu mencapai target penyerapan anggaran, tetapi juga harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Prinsip *value for money* menjadi pendekatan yang relevan untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah memenuhi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Sari & Fitri, 2023; Frinaldi & Putri, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Transparansi informasi keuangan

terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Putri & Diana, 2024; Lumban Gaol et al., 2024). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan daerah (Safira, 2023; Wakman et al., 2025). Kompetensi aparatur juga menentukan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah (Saskia et al., 2025; Sari et al., 2023). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (Kardina et al., 2024; Lathifah et al., 2024; Sepria Utami et al., 2025).

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji transparansi, akuntabilitas, SPIP, kompetensi aparatur, audit sektor publik, teknologi informasi, dan *value for money* secara parsial terhadap kualitas tata kelola keuangan publik. Penelitian Mandasari et al. (2024), Wakman et al. (2025), Saskia et al. (2025), Putri dan Diana (2024), serta Nabila dan Maulina (2025) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor-faktor tersebut dengan kualitas pengelolaan keuangan publik. Namun, penelitian yang mengintegrasikan capaian kinerja fiskal daerah, opini audit BPK, transparansi, SPIP, kompetensi aparatur, teknologi informasi, dan prinsip *value for money* dalam menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif *good governance*.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Good Governance**

*Good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan *good governance* bertujuan menciptakan pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Sungkar, 2023; Maolani et al., 2023; Leunupun & Killay, 2026). Dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip *good governance* menjadi landasan untuk memastikan bahwa

setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Masithoh, 2024).

## **2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang andal, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah (Mandasari et al., 2024; Nabila & Maulina, 2025). Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan (Putri et al., 2025).

## **2.3 Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah. Transparansi yang tinggi akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Putri & Diana, 2024; Lumban Gaol et al., 2024; Suliadi & Mas'ud, 2024).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP memiliki peran strategis dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah (Safira, 2023; Wakman et al., 2025).

## **2.4 Audit Sektor Publik dan Value for Money**

Audit sektor publik merupakan instrumen pengawasan yang bertujuan menilai kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hasil audit memberikan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan publik (Talantan et al., 2025; Putri et al., 2025).

Konsep *value for money* menekankan pentingnya ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik. Pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip *value for money* akan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan efisien (Sari & Fitri, 2023; Frinaldi & Putri, 2024).

## **2.5 Kompetensi Aparatur dan Teknologi Informasi**

Kompetensi aparatur merupakan kemampuan yang dimiliki pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Aparatur yang kompeten akan mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan (Saskia et al., 2025; Sari et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah juga mendukung efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan pemerintah (Kardina et al., 2024; Lathifah et al., 2024; Sepria Utami et al., 2025).

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang dalam perspektif *good governance* (Supriyono et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data dan dokumen yang tersedia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dokumen kinerja pemerintah daerah, serta berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian (Andni & Hidayah, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah dokumen resmi, laporan keuangan, hasil audit, regulasi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fokus analisis diarahkan pada capaian opini audit, realisasi pendapatan daerah, struktur belanja daerah, transparansi pengelolaan keuangan, efektivitas SPIP, kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan prinsip *value for money* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan untuk mengidentifikasi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip *good governance* serta faktor-faktor yang memengaruhinya (Ruwito & Praningtyas, 2024).

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen pemerintah, laporan audit, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu sehingga data yang digunakan memiliki validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Supriyono et al., 2023).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Padang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali secara kumulatif atau 12 tahun berturut-turut hingga Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Padang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan memenuhi prinsip kewajaran penyajian laporan keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mandasari et al. (2024) dan Nabila dan Maulina (2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

tercermin dari kemampuan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang andal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, akuntabilitas tidak hanya diukur melalui kualitas laporan keuangan, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penilaian akuntabilitas perlu dikaitkan dengan capaian kinerja fiskal, efektivitas program pembangunan, dan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

#### **4.2 Analisis Kinerja Fiskal dan Pengelolaan APBD Kota Padang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025, total APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,86 triliun. Struktur belanja daerah menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,37 triliun atau sekitar 90 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, belanja modal tercatat sebesar Rp252 miliar atau sekitar 9,5 persen dari total belanja.

Selain itu, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,85 triliun atau sebesar 99,15 persen dari target yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat realisasi pendapatan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki kapasitas fiskal yang cukup baik dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Namun demikian, dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas alokasi anggaran. Belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **4.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang bertujuan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Padang telah menunjukkan upaya peningkatan transparansi melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD, publikasi

informasi keuangan daerah, serta keterbukaan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri dan Diana (2024) serta Lumban Gaol et al. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Semakin terbuka informasi keuangan yang disampaikan pemerintah, semakin besar peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **4.4 Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Audit Sektor Publik**

Keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan melalui audit sektor publik. SPIP berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan SPIP membantu pemerintah daerah dalam meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memperkuat sistem pengendalian organisasi. Temuan ini mendukung penelitian Safira (2023) dan Wakman et al. (2025) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, audit sektor publik yang dilakukan oleh BPK memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah. Talantan et al. (2025) menjelaskan bahwa audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Putri et al. (2025).

#### **4.5 Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pemerintah. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang baik terhadap regulasi keuangan daerah akan mampu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan secara profesional dan akuntabel.

Penelitian Saskia et al. (2025) dan Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* dan kualitas pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks Pemerintah Kota Padang, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama bertahun-tahun menunjukkan adanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang relatif baik dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Selain kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi keuangan memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kardina et al. (2024), Lathifah et al. (2024), dan Sepria Utami et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **4.6 Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Value for Money**

Konsep *value for money* menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian manfaat yang optimal bagi masyarakat. Prinsip ini mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Tingginya realisasi pendapatan daerah dan keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah memiliki fondasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penggunaan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Sari dan Fitri (2023) serta Frinaldi dan Putri (2024) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *value for money* dapat meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan publik serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

#### **4.7 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Good Governance**

Berdasarkan hasil analisis, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang menunjukkan kondisi yang relatif baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan, tingginya realisasi pendapatan daerah, penerapan transparansi pengelolaan keuangan, keberadaan SPIP yang mendukung pengendalian internal, kompetensi aparatur yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perspektif *good governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, optimalisasi alokasi anggaran, khususnya peningkatan proporsi belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah, masih perlu menjadi perhatian guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang dalam perspektif *good governance* menunjukkan kondisi yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan Pemerintah Kota Padang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan, tingginya realisasi pendapatan daerah yang mencapai 99,15 persen dari target yang ditetapkan, serta adanya dukungan transparansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa audit sektor publik berperan penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan melalui mekanisme pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain itu, penerapan prinsip *value for money* menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang telah tercapai, dimana pengelolaan keuangan daerah secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi sebagai unsur utama *good governance*.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa struktur APBD Kota Padang masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran yang berorientasi pada pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang disarankan untuk terus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pengendalian internal, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Selain itu, peningkatan proporsi belanja yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran di masa mendatang agar prinsip *value for money* dapat diterapkan secara lebih optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder, sehingga analisis yang dilakukan bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan dokumen yang dapat diakses. Penelitian ini juga belum melibatkan data primer melalui wawancara atau survei terhadap pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer serta memperluas objek penelitian pada beberapa pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif *good governance*.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Andni, R., & Hidayah, N. F. (2023). Penerapan prinsip pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good financial government of village. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1788>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/333840>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Pemko Padang kembali raih*

*opini WTP dari BPK RI untuk LKPD 2025*. BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. <https://sumbar.antaranews.com/berita/764153/pemkot-padang-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri-untuk-lkpd-2025>

- Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 255–263. <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/60>
- InfoPublik. (2024). *APBD Kota Padang 2025 disepakati Rp2,86 triliun, siap dukung program prioritas*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/893134/apbd-kota-padang-2025-disepakati-rp2-86-triliun>
- Kardina, M., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Magister Administrasi Publik. (2024). Penilaian penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 615–620. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7231>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis akuntabilitas birokrasi publik dalam sistem keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7224>
- Leunupun, E. G., & Killay, T. (2026). Good governance dan efektivitas pengelolaan dana desa: Analisis pada Pemerintah Desa Moain di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Akuntansi Kompetif*. <http://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/2854>
- Lumban Gaol, L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Mandasari, Y. E., Darajat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(5), 35–43. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11237>
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7. <http://jurnaldialektika.com>
- Masithoh, N. (2024). Manajemen keuangan dana desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7936>
- Nabila, P., & Maulina, I. (2025). Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *JAMANTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, 5(1). <https://doi.org/10.36563/jamanta.v5i1.1517>
- Padangkita. (2026). *Pemko Padang sampaikan pertanggungjawaban APBD 2025, pendapatan daerah capai 99,15 persen*. <https://padangkita.com/wali-kota-padang-sampaikan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2025-pendapatan-capai-9915->

persen

- Prayogo, Y., Fikri, A. S., Nandini, K. P., Syariah, E., Thaha, S., & Jambi, S. (2023). Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 44–58. <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamikapage44>
- Putri, A. E., & Diana, N. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepuasan masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 14960–14972. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14960>
- Putri, D. A., Rahmah, M., Khairini, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam penguatan akuntabilitas keuangan daerah: Analisis efektivitas audit dan tindak lanjut rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 438–443.
- Ruwito, E. N., & Praningtyas, E. R. V. (2024). Accountability document as a symbol of the effectiveness of local government financial management. *Proceeding of the International Seminar on Business, Economics, Social Science, and Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.33830/isbest.v4i1.3243>
- Safira, W. R. (2023). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah* (Skripsi Sarjana). Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
- Sari, M., & Fitri, Y. (2023). Pengaruh penerapan konsep value for money dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 841–855. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.779>
- Sari, R. P., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan good governance (Studi kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 183–192. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.852>
- Saskia, A., Setiawan, A. B., & Anwar, S. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur terhadap good governance pada dana kelurahan di tingkat kecamatan. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(1), 117–130. <https://doi.org/10.31933/sj5gap68>
- Sepria Utami, A., Ajiman, G. S., Turnip, C., & Hanoselina, Y. (2025). Pemanfaatan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(12). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Safira, W. R. (2023). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah*. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
- Suliadi, D., & Mas'ud, M. (2024). Pengaruh sistem akuntansi pemerintahan, penyajian

laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. *Gendhera Buana Jurnal*, 2(1), 1–14. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj/article/view/4251>

Sungkar, A. A. (2023). Good governance dalam pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 200–205. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/300>

Supriyono, S., Sari, I. N., Kusuma, D. W., Diah, & Puji. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10496.30724>

Talantan, H., Baharuddin, B., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran auditor dalam transparansi keuangan daerah: Pemeriksaan SPJ fungsional pada SKPD Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 251–259. <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1079>

Wakman, D. R., Zakaria, Z., Pasolo, F., Rasyid, A., & Rumasukun, R. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa Distrik Elelim Kabupaten Yalimo. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1287–1301. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2721>